

# BAB I

## PENDAHULUAN

**B**erdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Probolinggo. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk dan ditelah diterbitkannya Perda Kabupaten Probolinggo No. 6 Tahun 2016.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana daerah tahun 2019 ini telah melalui tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah bencana sebagai output dari proses manajemen diatas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo sesuai Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2016.

Selain Perubahan Iklim (Climate Change) yang mengglobal yang akhir dekade ini akibat ulah manusia terhadap alam sekitarnya yang tidak dapat dihindari dampaknya saat bencana alam itu terjadi diantaranya Air Rob dengan Abrasi air lautnya, Angin Puting Beliung, Banjir bandang, Tanah Longsor, Erupsi Gunungapi serta Krisis air

bersih/Kekeringan saat musim kemarau, juga adanya perubahan fisik sosial masyarakat yang sangat besar menyisakan masalah yang sangat kompleks yaitu pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal yang aman terdampak bencana alam walaupun berada di wilayah daerah rawan bencana sesuai Peta Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Visi yang berdasarkan pada falsafah Manajemen Penanggulangan Bencana ingin mewujudkan masyarakat mempunyai daya hindar, daya adaptasi, daya daya tolak dan daya lenting melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo tahun 2019, Rencana kerja ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo di mana tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019– 2023 Kabupaten Probolinggo.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

## 1.1. LATAR BELAKANG

**Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan** merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sbb:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42)
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
15. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Probolinggo;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
19. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Nomor : 54 Tahun 2013 tentang Renstra Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 34 Tanggal 17 Juli 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2019.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan BPBD tahun 2019 ini disusun dengan maksud dan tujuan Rancangan Rencana Kerja tahun 2019 ini adalah rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo sebagai upaya mencari dan merumuskan isu strategis, dikaitkan dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang telah dijabarkan dalam Rencana Setrategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 dan diharapkan sudah dapat menyerap sebagian besar dari program-program yang direncanakan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 juga berupaya untuk mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo secara umum

1. Sebagai Penjabaran atas implementasi dari visi dan misi,
2. Sebagai motivasi untuk mewujudkan peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
- 2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, maka perlu adanya gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Probolinggo tahun 2019 ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

##### b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan BPBD Kabupaten Probolinggo pada tahun anggaran 2018 dilakukan dengan 7 program dan 26 kegiatan.

Tujuan BPBD yaitu ***Meningkatkan Daya Tanggap Bencana*** memiliki 3 (tiga) Program kerja yang dapat mendukung , yaitu :

1. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
2. Program Kedaruratan Dan Logistik
3. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kerja sasaran yaitu :

1. Persentase peningkatan jumlah desa tanggap bencana
2. Persentase korban tertangani
3. Persentase aktivasi pemulihan pasca bencana

Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
2. Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif , terkoordinir dan /terpadu;
4. Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 ini, evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah program kegiatan tahun 2018 seperti yang ada dalam LKjIP Tahun 2018 yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018. Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja PD tahun 2018**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD) (tahun n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu / n-2)			Target program/kegiatan renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2018(tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	9
	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</b>										
1.06.1.06.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola aset dan keuangan SKPD	100	0	100	100	100	100	100	100	
1.06.1.06.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jasa Tenaga Non PNS dan Bahan Habis Pakai	100	0	100	98.47	98.47	100	99.71	99.71	
1.06.1.06.02.01.01.22	Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	100	0	100	99.95	99.95	100	99.42	99.42	
1.06.1.06.02.01.01.23	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	0	100	85.94	85.94	100	69.63	69.63	



	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tertib dan tepat waktu</b>									
1.06.1.06.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	Honorarium Tenaga Akuntansi	100	0	100	100	100	100	100	100	
1.06.1.06.02.06.05	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	Penyusunan Rencana Program	100	0	100	99.85	99.85	100	93.11	93.11	
1.06.1.06.02.06.10	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekon Aset dan Persediaan Barang	100	0	100	99.83	99.83	100	99.75	99.75	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
1.06.1.06.02.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	Belanja Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur	100	0	100	99.78	99.78	100	99.74	99.74	
1.06.1.06.02.01.02.33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100	0	100	97.31	97.31	100	93.57	93.57	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			0							
1.06.1.06.02.01.05.05	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDA SKPD	Belanja Pengembangan kualitas SDA	100	0	100	99.49	99.49	100	98.18	98.18	
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>										
1.06.1.06.02.01.25.05	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	Sarana Publikasi Informasi Daerah Rawan Bencana	100	0	100	97.56	97.56	100	98.68	98.68	

1.06.1.06.02.01.25.07	Aktivasi Relawan BPBD	Pelaksanaan Aktivitas Relawan	100	0	100	99.85	99.85	100	99.05	99.05	
1.06.1.06.02.01.25.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Probolinggo tangguh bencana	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100	0	100	99.98	99.98	100	91.08	91.08	
1.06.1.06.02.01.25.15	Gladi Relawan	Gelar Relawan Penanggulangan Bencana	100	0	100	95.33	95.33	100	0	0	
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Tersusunnya Review Peta Rawan Bencana	100	0	100	0	0	100	0	0	
	Pelatihan/Bintek Tim Reaksi Cepat BPBD	Terlaksananya Pelatihan Tim Reaksi Cepat	100	0	100	0	0	100	0	0	
1.06.1.06.02.01.25.10	Bintek Pencegahan Dini (Mitigasi) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Terlaksananya Bintek PRB	100	0	100	0	0	100	96.43	96.43	
1.06.1.06.02.01.25.13	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Penyusunan Rencana Kontinjensi Tanah Longsor	100	0	100	98.87	98.87	100	0	0	
1.06.1.06.02.01.25.17	Pengembangan Informasi Pencegahan Dini	Penyebaran Informasi Dini Secara Elektronik	100	0	100	97.74	97.74	100	0	0	
1.06.1.06.02.01.25.18	Penunjang Kegiatan Apel Siaga Kebencanaan	Pelaksanaan Apel Siaga	100	0	100	98.22	98.22	100	98.86	98.86	
1.06.1.06.02.01.25.08	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	100	0	100	100	100	100	96.63	96.63	
1.06.1.06.02.01.25.16	Gladi Posko Banjir dan longsor	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana banjir dan longsor	100	0	100	0	0	100	98.03	98.03	

<b>Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana</b>											
1.06.1.06.02.01.26.04	Aktivasi masyarakat pasca bencana	Terlaksananya Kerja Bhakti akibat Pasca Bencana	100	0	100	100	100	100	93.89	93.89	
1.06.1.06.02.01.26.12	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan	Terbangunnya Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih	100	0	100	99.61	99.61	100	97.47	97.47	
1.06.1.06.02.01.26.11	Pelatihan aplikasi jitu Pasna	Terlaksananya Pelatihan Jitu Pasna	100	0	100	0	0	100	93.06	93.06	
	Pembuatan sumur bor di wilayah bencana kekeringan	Terbangunnya Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih	100	0	100	0	0	100			
1.06.1.06.02.01.26.09	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	Terlaksananya Monev Pasca Bencana	100	0	100	0	0	100	94.82	94.82	
1.06.1.06.02.01.26.13	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana bersumber dari BNPB	Terbangunan daerah daerah yang terdampak Pasca Bencana	100	0	100	98.63	98.63	100	0	0	
<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>											
1.06.1.06.02.01.27.01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	100	0	100	98.98	98.98	100	99.07	99.07	
1.06.1.06.02.01.27.03	Penanganan Siaga Darurat Bencana	Penanganan Operasional Siaga Darurat	100	0	100	98.46	98.46	100	98.91	98.91	
1.06.1.06.02.01.27.06	Pemulihan Dini Darurat Bencana	Perbaikan Darurat Bencana	100	0	100	97.05	97.05	100	96.93	96.93	
	Perlindungan Kelompok/masyarakat Rentan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Rentan Bencana	100	0	100	0	0	100	0	0	

1.06.1.06.02.01.27.13	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tercapainya Kedaruratan dan Logistik dalam Status Darurat Bencana	100	0	100	99.96	99.96	100	99.93	99.93	
1.06.1.06.02.01.27.14	Manajemen Logistik dan Peralatan PB	terbentuknya Gudang Logistik PB	100	0	100	99.77	99.77	100	0	0	
	Penunjang Kegiatan Penanganan Darurat	Koordinasi dengan wilayah rawan bencana	100	0	100	0	0	100	0	0	
1.06.1.06.02.01.27.10	Penunjang Pusdalops	Terpenuhinya Sarana Pendukung Pusdalops	100	0	100	99.04	99.04	100	99.24	99.24	

## 2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN SKPD

TABEL 2.2  
PENCAPAIAN KERJA PELAYANAN SKPD  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO	Indikator *)	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar nasional	(PP-6/'08)	Tahun 2017 (tahun n-2)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2017 (tahun n-2)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>IKU BPBD</b>											
1	Persentase peningkatan jumlah desa tanggap bencana	Ada		11,11	16,95	17,54	18,71	11,11	16,95	17,54	18,71	
2	Persentase korban tertangani	Ada		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase aktivasi pemulihan dini pasca bencana	Ada		100	100	100	100	100	100	100	100	

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good government* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kab. Probolinggo telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, diantaranya :

1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat dusun,
2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada,
3. Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

#### ➤ **Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :**

##### 1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
- b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
- c. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;

- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
- i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

## 2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Kedaruratan dan logistik sebagai berikut :

- a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
- g. Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana

## 3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
- c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- d. Koordinasi pinalainkerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;

e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah.

➤ **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :**

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
4. Menghargai budaya lokal,
5. Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

➤ **Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**

8. Kondisi Geografis Kabupaten Probolinggo;
9. Keterbatasan dana;
10. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
11. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

➤ **Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**

1. Dukungan undang-undang,
2. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana,
3. Dukungan pimpinan.

➤ **Formulasi isu-isu penting**

1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil,
2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana,
3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana,
4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana,
5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review yang dilakukan terhadap rancangan awal RKPD adalah melakukan proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil dari perbandingan tersebut adalah menganalisis



kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam prioritas Penanganan bencana meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ingin dicapai :
  - a. Tertib Administrasi Perkantoran;
  - b. Pengembangan Sistem Pelaporan Kerja Aparatur dan Keuangan.
2. Program Pencegahan Dini yang ingin dicapai :
  - a. Tersedianya data yang akurat dan valid untuk mempercepat kegiatan evakuasi jika terjadi bencana dan kegiatan evaluasi pasca bencana
  - b. Akan lebih cepat menginformasikan kemungkinan akan terjadinya bencana;
  - c. Pelaksanaan Evakuasi korban bencana berjalan lancar dan cepat;
  - d. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan benar dalam penanggulangan bencana;
  - e. Peningkatan ketrampilan relawan Penanggulangan Bencana;
  - f. Peningkatan SDM TRC dalam melakukan pengkajian secara cepat, tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
  - g. Meningkatkan upaya-upaya Penanggulangan Bencana;
  - h. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana dan tersedianya akses pendukung komunikasi.

TABEL 2.3

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</b>										
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	100%	46,800,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	100%	46,800,000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	BPBD Kab. Prob	Terbayarnya jasa tenaga non PNS	100%	151,152,400	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	BPBD Kab. Prob	Terbayarnya jasa tenaga non PNS	100%	1,507,170	
	Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor	BPBD Kab. Prob	Tersedianya jasa sarana dan prasarana kantor	100%	426,505,000	Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor	BPBD Kab. Prob	Tersedianya jasa sarana dan prasarana kantor	100%	4,240,373	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD Kab. Prob	Terbayarnya rekening listrik, air, internet, surat kabar, sewa hosting, pajak kendaraan, STNK	100%	303,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD Kab. Prob	Terbayarnya rekening listrik, air, internet, surat kabar, sewa hosting, pajak kendaraan, STNK	100%	211,522,673	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	BPBD Kab. Prob	Terbayarnya pelaporan keuangan akhir tahun BPBD	100%	34,904,000	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun	BPBD Kab. Prob	Terbayarnya pelaporan keuangan akhir tahun BPBD	100%	34,904,000	

	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	BPBD Kab. Prob	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan pelaporan kinerja SKPD	100%	69,660,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	BPBD Kab. Prob	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan pelaporan kinerja SKPD	100%	64,862,500	
	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPBD Kab. Prob	Terselenggaranya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100%	14,185,000	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPBD Kab. Prob	Terselenggaranya peningkatan pengelolaan barang milik daerah	100%	14,150,000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	304,790,000	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	304,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	369,330,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	345,591,700	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDA SKPD	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya pelatihan pengembangan sumber daya aparatur	100%	171,690,000	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDA SKPD	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya pelatihan pengembangan sumber daya aparatur	100%	168,558,800	
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>					<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>					
	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya pencegahan dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	350,000,000	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya pencegahan dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	345,393,216	
	Aktivasi Relawan BPBD	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya sosialisasi pada relawan	100%	95,000,000	Aktivasi Relawan BPBD	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya sosialisasi pada relawan	100%	94,095,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Probolinggo tangguh	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak terkait agar	100%	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kabupaten Probolinggo tangguh bencana	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak terkait agar	100%	91,080,000	

	bencana		tangguh bencana					tangguh bencana			
	Bintek Pencegahan Dini (Mitigasi) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Bintek Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	100%	150,000,000	Bintek Pencegahan Dini (Mitigasi) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Bintek Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	100%	144,650,000	
	Penunjang Kegiatan Apel Siaga Kebencanaan	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Apel Siaga Kebencanaan	100%	80,000,000	Penunjang Kegiatan Apel Siaga Kebencanaan	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Apel Siaga Kebencanaan	100%	79,090,000	
	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya sosialisasi desa tangguh bencana	100%	100,000,000	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya sosialisasi desa tangguh bencana	100%	96,630,000	
	Gladi Posko Banjir dan longsor	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Gladi Posko Banjir dan longsor	100%	100,000,000	Gladi Posko Banjir dan longsor	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Gladi Posko Banjir dan longsor	100%	98,025,000	
	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>					<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>					
	Aktivasi masyarakat pasca bencana	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya kerja bakti masyarakat pasca bencana	100%	165,000,000	Aktivasi masyarakat pasca bencana	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya kerja bakti masyarakat pasca bencana	100%	154,922,840	
	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan	BPBD Kab. Prob	Tersedianya Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan	100%	170,775,000	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan	BPBD Kab. Prob	Tersedianya Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan	100%	166,450,000	
	Pelatihan aplikasi jitu Pasna	BPBD Kab. Prob	Tercapainya perhitungan pasca bencana	100%	100,000,000	Pelatihan aplikasi jitu Pasna	BPBD Kab. Prob	Tercapainya perhitungan pasca bencana	100%	93,064,000	
	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	100%	85,000,000	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	BPBD Kab. Prob	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	100%	80,599,482	
	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>					<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>					

	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	BPBD Kab. Prob	terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	100%	172,895,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	BPBD Kab. Prob	terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	100%	171,283,400	
	Penanganan Siaga Darurat Bencana	BPBD Kab. Prob	terlaksananya perbaikan Darurat Bencana	100%	128,880,000	Penanganan Siaga Darurat Bencana	BPBD Kab. Prob	terlaksananya perbaikan Darurat Bencana	100%	127,478,296	
	Pemulihan Dini Darurat Bencana	BPBD Kab. Prob	terlaksananya perbaikan Darurat Bencana	100%	230,165,000	Pemulihan Dini Darurat Bencana	BPBD Kab. Prob	terlaksananya perbaikan Darurat Bencana	100%	223,089,900	
	Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC)	BPBD Kab. Prob	Terselenggaranya Pelatihan personil Tim Reaksi Cepat (TRC)	100%	75,025,000	Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC)	BPBD Kab. Prob	Terselenggaranya Pelatihan personil Tim Reaksi Cepat (TRC)	100%	74,975,000	
	Penunjang Pusdalops	BPBD Kab. Prob	Tersedianya Penunjang Pusdalops	100%	510,200,000	Penunjang Pusdalops	BPBD Kab. Prob	Tersedianya Penunjang Pusdalops	100%	506,347,000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

TABEL 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	USULAN	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Kab. Probolinggo		
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		59.100.000	
	- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS		164.134.000	
	Penyedia Jasa Sarana dan Prasarana - Kantor		349.715.000	
	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi - Perkantoran		372.888.000	
			<b>945.837.000</b>	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Kab. Probolinggo		
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan - Prasarana Aparatur		318.327.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana - Aparatur		274.408.600	
			<b>592.735.600</b>	
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Kab. Probolinggo		
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas - Sumber Daya Aparatur SKPD		49.750.000	
			<b>49.750.000</b>	
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</b>	Kab. Probolinggo		
	<b>CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir - Tahun		33.400.000	
	Penyusunan Rencana Program dan - Kegiatan SKPD		22.300.000	
			<b>55.700.000</b>	
5	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>	Kab. Probolinggo		
	- Aktivasi Relawan BPBD		100.000.000	
	- Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana		367.500.000	

	Kesiapsiagaan Penanggulangan - Bencana Berbasis Masyarakat		145.000.000	
	Bimtek Pencegahan Dini ( Mitigasi ) dan - Penanggulangan Resiko Bencana ( PRB)		150.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi menuju Kabupaten Probolinggo Tangguh - Bencana		85.500.000	
	- Penunjang Kegiatan Apel Siaga		175.000.000	
			<b>1.023.000.000</b>	
6	<b>PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>	Kab. Probolinggo		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan - Tanggap Darurat		250.000.000	
	- Penanganan Siaga Darurat Bencana		100.000.000	
	- Pemulihan Dini Kedaruratan		100.000.000	
	Penunjang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana - (PUSDALOPS)		825.000.000	
			<b>1.275.000.000</b>	
7	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	Kab. Probolinggo		
	- Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana		71.355.000	
	- Aktivasi Masyarakat Pasca Bencana		140.000.000	
	- Pelatihan aplikasi jitu Pasna		61.000.000	
	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih di Daerah - Rawan Kekeringan		162.645.000	
			<b>435.000.000</b>	
			<b>4.377.022.600</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI**

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2014 – 2019 merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana merupakan pedoman bagi Kementerian atau Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB) merupakan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Dari kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dari tugas pokok dan fungsi BPBD :

1. Persentase masyarakat siaga bencana;
2. Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik;
3. Persentase tersedianya sarpras penanggulangan bencana.

Prioritas yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana adalah :

1. Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencanamelalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
4. Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja Perubahan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo.



Adapun rumusan **tujuan** di dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah :

**“ Meningkatkan Daya Tanggap Bencana “**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana kerja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah:

1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah desa tanggap bencana
2. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan logistik  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase korban tertangani
3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase aktivasi pemulihan pasca bencana
4. Terselenggaranya system perencanaan dan pelaporan yang akuntabel  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator hasil evaluasi kinerja

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Belum adanya keseragaman antara penyelenggara penanggulangan bencana mengenai type BPBD secara nasional;
2. Belum adanya regulasi yang jelas tentang pembentukan BPBD karena belum tertulis tertuang bahkan tersirat di peraturan kementerian dan lembaga terkait secara nasional;

3. Penanganan penanggulangan bencana rata-rata hanya secara sporadis karena belum semua BPBD mempunyai dasar hukum rencana penanggulangan bencana beserta turunannya (Protap, SOP, dll);
4. Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai skala prioritas;
5. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang;
6. Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta membangun sistem peringatan dini masih kurang;
7. Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rrencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2019**  
**Kabupaten Probolinggo**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>928,257,400</b>				<b>945.837,000</b>
	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	8 Tenaga Honorer	BPBD Kab. Probolinggo	100%	151.152.400	DAU		100%	164.134.000
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	14 Orang Pengelola Keuangan dan Asset	BPBD Kab. Probolinggo	100%	46.800.000	PAD		100%	59.100.000
	Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor	1 Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Kegiatan Rakomas Kebencanaan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	426.505.000	DAU		100%	349.715.000

	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	4 Paket Penyediaan Jasa Telepon, Internet, Listrik dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	BPBD Kab. Probolinggo	100%	303.800.000	DAU		100%	372.888.000
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>					<b>674,120,000</b>				<b>592.735.600</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	1 Paket Jasa Service dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Kabupaten Probolinggo	100%	304.790.000	DAU		100%	318.327.000
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	6 Paket Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Kab. Probolinggo	100%	369.330.000	DAU		100%	274.408.600
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>171,690,000</b>				<b>49,750,000</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	1 Paket Bintek Pengelolaan Keuangan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	171.690.000	PAD		100%	49.750.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>					<b>118,749,000</b>				<b>55.700.000</b>
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tenaga Ahli Akuntansi	BPBD Kab. Probolinggo	100%	34.904.000	PAD		100%	33.400.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	5 Dokumen Perencana dan Laporan Kinerja	BPBD Kab. Probolinggo	100%	69.660.000	PAD		100%	22.300.000

	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket Laporan BMD dan Laporan Persediaan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	14.185.000	PAD		100%	-
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>				<b>975.000.000</b>				<b>1.023.000.000</b>
	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	1 paket publikasi informasi daerah rawan bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	350.000.000	PAD		100%	367.500.000
	Aktivasi Relawan BPBD	8 Kali aktivasi relawan BPBD	BPBD Kab. Probolinggo	100%	95.000.000	PAD		100%	100.000.000
	Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	5 Kali Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	100.000.000	PAD		100%	145.000.000
	Bimtek Pencegahan Dini (Mitigasi) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	1 Kali Pelaksanaan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	150.000.000	PAD		100%	150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	10 kali rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	100.000.000	PAD		100%	85.500.000
	Gladi Posko Banjir dan Longsor	1 Kali Pelaksanaan Gladi Posko	BPBD Kab. Probolinggo	100%	100.000.000	PAD		100%	-
	Penunjang kegiatan apel siaga kebencanaan	2 Kali	BPBD Kab. Probolinggo	100%	80.000.000	PAD		100%	175.000.000
	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>				<b>430.000.000</b>				<b>435.000.000</b>

	Aktivasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat	1 Paket Kerja Bakti Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	165.000.000	DAU		100%	140.000.000
	Pelatihan Aplikasi Jitu Pasma	Perhitungan dan kebutuhan Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	100.000.000	PAD		100%	61.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	3 Kali Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	85.000.000	PAD		100%	71.355.000
	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan		BPBD Kab. Probolinggo	100%	80.000.000	PAD		100%	162.645.000
	<b>Program Kedaruratan dan Logisik</b>				<b>1.117.165.000</b>				<b>1.275.000.000</b>
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	172.895.000	DAU		100%	250.000.000
	Penanganan Siaga darurat bencana	1 Paket Penanganan Siaga Darurat Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	128.880.000	DAU		100%	100.000.000
	Pemulihan dini darurat bencana	1 Paket Pengadaan Sembako dalam Pemulihan Dini	BPBD Kab. Probolinggo	100%	230.165.000	DAU		100%	100.000.000

		Kedaruratan							
	Penunjang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)	1 Paket Peralatan Komunikasi dan 1 Paket Peralatan Rumah Tangga PUSDALOPS dan Pemberitaan PUSDALOPS	BPBD Kab. Probolinggo	100%	510.200.000	DAU		100%	825.000.000
	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) PB BPBD	1 Kali	BPBD Kab. Probolinggo	100%	75.025.000	-		100%	-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan dari Renja tahun 2019 dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**